

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1) Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa upaya penertiban tarif parkir yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a) Melakukan teguran secara lisan

Dinas perhubungan Kota Madiun dalam menanggapi pelanggaran parkir yang dilakukan para oknum juru parkir, pertama akan melakukan investigasi yang dilakukan oleh Dept.UPTD khusus parkir guna memeriksa secara langsung lokasi dan memberikan peneguran secara lisan.

b) Melakukan peneguran secara tertulis

Peneguran terakhir secara tertulis akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun jika pelanggaran masih tetap dilakukan oleh oknum juru parkir setelah diberikan peneguran secara lisan.

c) Mencabut izin menyelenggarakan parkir

Pencabutan izin menyelenggarakan parkir akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota madiun jika oknum juru parkir tetap melanggar ketentuan parkir setelah peneguran-peneguran secara lisan dan tertulis.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- 2) Dalam pelaksanaan upaya penertiban tarif parkir di Kota Madiun, terdapat beberapa kendala yang juga harus diperhatikan oleh Dinas Perhubungan yaitu ;
- a) Kendala dari keterbatasan jumlah SDM dishub  
upaya hukum penertiban tarif parkir ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Perhubungan Kota Madiun, sehingga pengawasan sangat minim terhadap para juru parkir.
  - b) Kendala dari masyarakat pengguna jasa parkir  
Pelanggaran-pelanggaran parkir bisa terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari anggota masyarakat sebagai juru parkir terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. karena bentuk pelanggaran tarif parkir yang kecil sehingga masyarakat menganggap sepele hal tersebut dan tidak mau melaporkan kepada pihak berwenang sehingga pelanggaran tersebut menjadi kebiasaan dan terus-menerus terjadi.
  - c) Kendala dari kesadaran hukum juru parkir  
Pelanggaran-pelanggaran parkir ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dari para juru parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran terus terjadi. Karena minimnya pengawasan dari pemerintah, sehingga para oknum juru parkir bertindak semena-mena dengan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan yang ada.

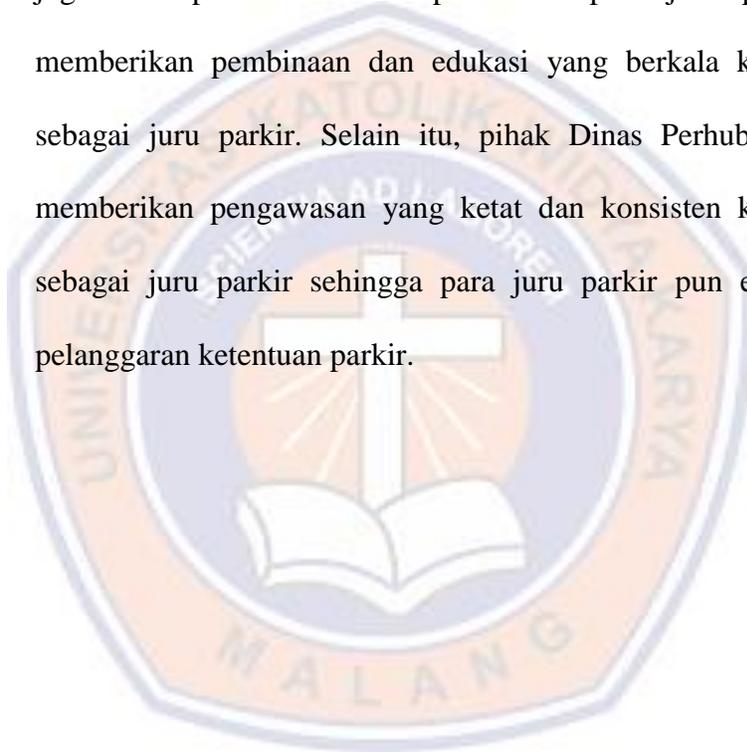
## 4.2 Saran

- 1) Dalam upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum kedepannya Dinas Perhubungan Kota Madiun harus lebih kreatif agar dapat memberikan inovasi dengan banyak menitik beratkan pada adanya langkah preventif yang dilakukan, artinya bahwa sebelum dikeluarkannya izin menjadi juru parkir dan penentuan lokasi parkir di tepi jalan umum, para juru parkir sudah seharusnya dibekali dengan pelatihan awal dan berkelanjutan.
- 2) Dalam melakukan upaya penertiban terhadap para pelanggar parkir, Dinas Perhubungan Kota Madiun, para juru parkir dan masyarakat pengguna parkir diharapkan :
  - a) Pemerintah diharapkan menambah personil SDM untuk Dinas Perhubungan Kota Madiun. Dinas Perhubungan Kota Madiun diharapkan membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perparkiran di Kota Madiun agar penyelenggaraan perparkiran di Kota Madiun bisa berjalan dengan tertib dan taat hukum
  - b) Masyarakat pengguna diharapkan lebih sadar dan ikut andil dalam penertiban tarif parkir, dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dengan tidak mengabaikan begitu saja setiap pelanggaran yang terjadi sehingga kesadaran akan hukum dapat terwujud. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Madiun harus lebih menekankan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal peraturan daerah mengenai perparkiran agar masyarakat mengerti dan memahami tentang pentingnya penertiban

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

parkir, dan memberikan akses mudah dalam hal melaporkan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan juru parkir kepada pemerintah.

- c) Para juru parkir diharapkan selalu taat akan peraturan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang dalam melakukan pelanggaran parkir agar tercipta kebaikan dan kenyamanan bersama. Dinas Perhubungan Kota Madiun juga diharapkan harus memperhatikan para juru parkir ini dengan memberikan pembinaan dan edukasi yang berkala kepada masyarakat sebagai juru parkir. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan juga harus memberikan pengawasan yang ketat dan konsisten kepada masyarakat sebagai juru parkir sehingga para juru parkir pun enggan melakukan pelanggaran ketentuan parkir.



**DAFTAR PUSTAKA**



**BUKU**

- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta. 1998.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Pres, Yogyakarta.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, masyarakat, dan pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2006.
- Marbun, S.F. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan ke-9*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya. *sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Willy D.S Voll, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014.
- Yolanda, Clara. *Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalih Fungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016.
- Y. Sri, Pudyatmiko. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009.

**JURNAL**

Handrayani, Fitri. *Efektivitas Terhadap Pengutipan Pajak Parkir Dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Menurut Perda Kota Medan No.10 Tahun 2011*, jurnal hukum, Vol 2 No 3 Desember 2014, doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.20

Priyanda, Komang Trisna. *Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Jalan Raya Yang Melakukan Pelanggaran Rambu Larangan Parkir*, jurnal ilmu hukum Vol 6 No 5 Desember 2017

Rahardjo, Paiman *Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan*, jurnal penelitian Vol 10 No 6 tahun 2010

Rahman, Muhammad Yusuf. *Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*, Juranal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 Agustus 2020, doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92

Widiati, Ida Ayu Putu. *Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud*, Jurnal konstruksi Hukum, Vol 2 No1 Januari 2021, doi.org/10.22225/jkh.2.1.2999.207-212

## **Peraturan / Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 tahun 2017 Tentang Peraturan Perubahan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Parkir.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tata Kerja serta Rincian Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

## **Data Lapangan**

Database Dinas Perhubungan Kota Madiun Bidang Angkutan Darat

Wawancara Tertulis dengan Deddy Purnomo Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun 03 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

Wawancara Tertulis dengan Sutarto Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Darat inas Perhubungan Kota Madiun 02 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

Wawancara Tertulis dengan Agung Witjaksono Selaku Ketua Tim KBK Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 09 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

Wawancara Tertulis dengan Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 09 Juni Pukul 13.00 WIB

**SUMBER LAIN ;**

**Skripsi**

Atika, Riski. Skripsi dengan judul *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi jalan Umum Kota Metro*, Universitas Lampung, 2017.

**Internet**

dishub.madiunkota.go.id diakses pada tanggal 29 maret 2021 pukul 22.05 WIB

<https://dunianotaris.com/membuat-izin-penyelenggara-parkir.php> diakses pada tanggal 29 maret 2021 pukul 21.47 WIB

<https://madiunkota.bps.go.id> diakses pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 21.05 WIB

